

KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN SOSIAL DI KECAMATAN GUNUNGHALU KABUPATEN BANDUNG BARAT

Deni Nurdyana¹, Wina Nurulliah², Salsa Hairunnisa³, Dede Rizwan⁴, Siti Lailatul Mujizat⁵

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Wanita Internasional Universitas Wanita Internasional

Email: deni@iwu.ac.id¹, winanurulliah@gmail.com², salsa_hairunnisaaa@gmail.com³,

dederizwan.392001@iwu.ac.id⁴, sitilailatulh@gmail.com⁵

ABSTRAK

Keterlibatan perempuan dalam proses pembentukan kebijakan sosial di tingkat lokal merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan perempuan dalam pembentukan kebijakan sosial di Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat, dengan menyoroti tantangan struktural dan kultural yang dihadapi serta strategi pemberdayaan yang dapat memperkuat peran perempuan sebagai aktor kebijakan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi terhadap perangkat desa, aktivis perempuan lokal, serta ibu rumah tangga yang aktif dalam kegiatan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perempuan yang mulai aktif dalam forum musyawarah desa, partisipasi mereka masih terbatas secara substantif akibat norma sosial yang patriarkis, kurangnya dukungan kelembagaan, serta minimnya literasi politik. Namun demikian, terdapat potensi besar dalam pemberdayaan perempuan di tingkat akar rumput jika didukung oleh pelatihan, sosialisasi kebijakan afirmatif, dan keterlibatan aktif pemerintah desa. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk memperkuat praktik kebijakan yang inklusif dan responsif gender di tingkat lokal.

Kata Kunci: keterlibatan perempuan, kebijakan sosial, representasi politik lokal, kesetaraan gender, Gununghalu

ABSTRACT

Women's involvement in the formulation of social policies at the local level is a crucial aspect in achieving gender equality and social justice. This study aims to analyze the participation of women in the policymaking process in Gununghalu District, West Bandung Regency, by highlighting the structural and cultural challenges they face and identifying empowerment strategies to strengthen their role as policy actors. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation involving village officials, local female activists, and housewives actively engaged in community activities. The findings show that although some women have started to participate in village deliberative forums, their substantive involvement remains limited due to prevailing patriarchal norms, lack of institutional support, and low political literacy.

Nevertheless, there is strong potential for grassroots women's empowerment, especially if supported by leadership training, affirmative policy socialization, and active engagement from village authorities. This study contributes to promoting more inclusive and gender-responsive policymaking practices at the local level.

Keywords: women's involvement, social policy, local political representation, gender equality, Gununghalu

PENDAHULUAN

Keterlibatan perempuan dalam pembentukan kebijakan sosial merupakan elemen penting dalam upaya menciptakan keadilan sosial dan pembangunan yang inklusif. Dalam konteks Indonesia pasca-Reformasi, berbagai kebijakan afirmatif telah diupayakan, termasuk kuota 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Namun, kebijakan tersebut sebagian besar masih berfokus pada tingkat nasional dan belum sepenuhnya berdampak pada ruangruang pengambilan keputusan di tingkat lokal. Dalam kenyataannya, di banyak wilayah pedesaan seperti Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat, partisipasi perempuan dalam forum musyawarah desa, penyusunan program, hingga evaluasi kebijakan sosial masih tergolong rendah dan bersifat simbolik.

Padaahal, kebijakan sosial di tingkat lokal—seperti program pendidikan, kesehatan ibu dan anak, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi—sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup perempuan. Kurangnya keterlibatan perempuan dalam proses formulasi dan pengambilan keputusan terhadap kebijakan-kebijakan ini menyebabkan banyak kebijakan tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan spesifik perempuan. Hal ini diperparah oleh faktor kultural dan struktural seperti dominasi nilai patriarki, rendahnya tingkat pendidikan politik perempuan, serta kurangnya akses terhadap jaringan sosial dan politik.

Secara teoretis, keterlibatan perempuan dalam kebijakan sosial dapat dianalisis melalui lensa representasi deskriptif dan substantif sebagaimana dijelaskan oleh Hanna Pitkin (1967). Representasi deskriptif mengacu pada jumlah perempuan yang terlibat secara formal dalam institusi pengambilan keputusan, sementara representasi substantif berkaitan dengan sejauh mana perempuan membawa agenda dan kepentingan gender ke dalam kebijakan yang dihasilkan. Di tingkat desa, pendekatan ini penting karena banyak perempuan memiliki pengalaman langsung terkait kebutuhan sosial komunitasnya, tetapi tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyuarakan hal tersebut dalam proses kebijakan.

Penelitian-penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Chattopadhyay dan Duflo (2004) di India menunjukkan bahwa ketika perempuan terlibat aktif dalam pemerintahan lokal, kebijakan yang dihasilkan lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat akar rumput, seperti air bersih, kesehatan ibu-anak, dan pendidikan. Namun di Indonesia, hambatan untuk mencapai representasi substantif ini masih sangat kuat, terlebih di wilayah yang kental dengan struktur sosial patriarkal seperti Gununghalu.

Gununghalu, sebagai wilayah dengan karakter pedesaan dan budaya tradisional yang kuat, menjadi contoh yang representatif untuk mengkaji dinamika keterlibatan perempuan dalam kebijakan sosial. Meskipun beberapa perempuan mulai aktif dalam kegiatan sosial dan organisasi masyarakat, partisipasi mereka belum sepenuhnya terakomodasi dalam struktur formal seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Situasi ini menciptakan kesenjangan antara pengalaman sosial perempuan dan arah kebijakan yang ditetapkan pemerintah desa.

Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia juga memiliki komitmen terhadap implementasi Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan ke-5 (mewujudkan kesetaraan gender) dan Tujuan ke-16 (memperkuat institusi yang inklusif, partisipatif, dan representatif). Oleh karena itu, penguatan keterlibatan perempuan dalam kebijakan sosial di tingkat desa bukan hanya menjadi persoalan pembangunan lokal, tetapi juga bagian dari upaya pemenuhan komitmen pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana realitas sosial-politik perempuan di Kecamatan Gununghalu memengaruhi partisipasi mereka dalam kebijakan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perempuan telah terlibat secara bermakna dalam proses penyusunan kebijakan sosial, mengidentifikasi hambatan-hambatan struktural dan kultural yang dihadapi, serta menawarkan strategi pemberdayaan dan advokasi agar perempuan dapat berperan aktif sebagai aktor pembuat kebijakan di tingkat desa. Penelitian ini menjadi penting karena hingga saat ini masih sedikit kajian yang secara khusus menyoroti keterlibatan perempuan dalam pembentukan kebijakan sosial di tingkat desa, terutama di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Gununghalu yang memiliki struktur sosial patriarkal yang kuat. Sebagian besar studi terdahulu lebih banyak berfokus pada level nasional atau kota besar, sementara dinamika partisipasi perempuan di akar rumput belum banyak digali secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur, tetapi juga memberikan perspektif kontekstual dan lokal mengenai bagaimana hambatan serta potensi pemberdayaan perempuan dalam kebijakan sosial dapat dianalisis dan dikembangkan. Keterbaharuan dari penelitian ini terletak pada fokus empirisnya terhadap desa, aktor perempuan akar rumput, serta pendekatan interseksional yang digunakan untuk memahami kompleksitas representasi perempuan dalam forum kebijakan lokal.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis dalam memperkuat wacana dan implementasi kebijakan sosial yang inklusif dan responsif gender di tingkat lokal, khususnya di wilayah pedesaan.

1. Manfaat Teoretis

Secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian ilmu politik, sosiologi, dan studi gender dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan teori representasi politik, teori feminisme, serta praktik kebijakan sosial lokal. Penelitian ini juga berkontribusi terhadap pengembangan konsep representasi substantif dalam konteks desa, yang selama ini masih kurang tereksplorasi. Dengan menelaah dinamika sosial, budaya, dan institusional yang membentuk keterlibatan perempuan di tingkat desa, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi studi-studi selanjutnya yang menyoroti relasi gender dalam pengambilan keputusan di komunitas akar rumput.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah desa, lembaga legislatif lokal, organisasi perempuan, dan masyarakat sipil dalam merancang strategi pemberdayaan dan kebijakan afirmatif yang lebih kontekstual. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu:

Mengidentifikasi hambatan-hambatan sosial, budaya, dan kelembagaan yang menghambat partisipasi perempuan dalam forum kebijakan sosial di tingkat desa.

Memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk peningkatan kapasitas politik dan kepemimpinan perempuan di Gununghalu dan wilayah sejenis.

Mendorong terbentuknya ruang partisipasi yang lebih terbuka dan setara bagi perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan sosial.

Memperkuat kesadaran kolektif pemerintah lokal dan masyarakat tentang pentingnya representasi perempuan sebagai pilar utama dalam pembangunan sosial yang adil dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori-Teori Gender dan Keterlibatan dalam Kebijakan

1. Teori Representasi Politik dan Gender

Tinjauan terhadap keterlibatan perempuan dalam pembentukan kebijakan sosial di tingkat lokal membutuhkan pemahaman atas teori representasi politik, khususnya konsep yang dikembangkan oleh Hanna Pitkin (1967) mengenai representasi deskriptif dan substantif. Representasi deskriptif merujuk pada kehadiran perempuan secara fisik dalam lembaga pembuat kebijakan, seperti BPD atau tim RKPDes, sedangkan representasi substantif menekankan sejauh mana perempuan memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan kelompoknya melalui kebijakan yang dihasilkan.

Dalam konteks pedesaan seperti Gununghalu, penting untuk mengkaji bukan hanya jumlah perempuan yang hadir di forum musyawarah, tetapi juga apakah kehadiran tersebut menghasilkan kebijakan sosial yang lebih responsif terhadap isu-isu perempuan, keluarga, pendidikan anak, dan kesejahteraan rumah tangga.

2. Teori dan Pendekatan Feminisme

Teori feminisme memberikan landasan penting dalam melihat bagaimana relasi kuasa berbasis gender membentuk peluang dan hambatan perempuan dalam dunia kebijakan. Feminisme liberal menekankan pentingnya kesetaraan akses terhadap ruang pengambilan keputusan, serta peran negara dalam menjamin kesempatan yang adil melalui kebijakan afirmatif. Dalam hal ini, kuota perempuan dalam lembaga politik menjadi salah satu strategi untuk memperkuat representasi.

Sementara itu, feminisme radikal lebih menyoroti perlunya perubahan struktur sosial secara menyeluruh yang selama ini didominasi oleh sistem patriarkal. Pendekatan ini relevan dalam menganalisis budaya desa yang masih kuat mempertahankan pembagian peran berbasis gender, sehingga perempuan kerap diposisikan hanya dalam lingkup domestik.

Di sisi lain, feminisme interseksional menekankan bahwa pengalaman perempuan tidak homogen, karena dipengaruhi oleh kelas, status ekonomi, etnisitas, dan pendidikan. Dalam konteks Gununghalu, pendekatan ini membantu melihat bahwa hambatan yang dihadapi perempuan dari kalangan ibu rumah tangga bisa berbeda dengan aktivis lokal atau perangkat desa perempuan.

3. Gender Mainstreaming dan Kebijakan Sosial

Konsep pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) merupakan strategi yang diadopsi dalam kebijakan publik untuk memastikan bahwa perspektif gender terintegrasi dalam seluruh tahapan penyusunan kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dalam konteks kebijakan sosial, hal ini sangat penting mengingat kebijakan seperti bantuan sosial, pendidikan, kesehatan ibu-anak, dan pemberdayaan ekonomi rumah tangga sangat memengaruhi kehidupan perempuan.

Namun, di tingkat desa, pengarusutamaan gender sering kali belum menjadi praktik yang sistematis. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa integrasi perspektif gender dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) atau RKPDes masih sangat bergantung pada inisiatif individu dan belum menjadi komitmen kelembagaan.

4. Studi Empiris tentang Perempuan dan Kebijakan Lokal

Sejumlah studi empiris mendukung pentingnya keterlibatan perempuan dalam kebijakan sosial. Penelitian oleh Chattopadhyay dan Duflo (2004) di India menunjukkan bahwa desa yang dipimpin oleh perempuan cenderung mengalokasikan anggaran lebih besar untuk kebutuhan dasar masyarakat, seperti air bersih dan layanan kesehatan. Di Indonesia, keterlibatan perempuan dalam penyusunan Peraturan Desa tentang perlindungan anak atau pendidikan keluarga mulai menunjukkan hasil, meskipun masih terbatas dan sporadis.

Namun demikian, masih minim kajian akademik yang menggali keterlibatan perempuan dalam pembentukan kebijakan sosial di tingkat mikro seperti desa, terutama di wilayah pedesaan dengan budaya patriarki yang kuat seperti Gununghalu. Oleh karena itu, studi ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan memetakan bentuk partisipasi perempuan, tantangan yang mereka hadapi, serta potensi transformasi sosial melalui pemberdayaan dan penguatan kapasitas.

KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa keterlibatan perempuan dalam pembentukan kebijakan sosial di tingkat lokal tidak hanya berkaitan dengan kuantitas kehadiran mereka dalam lembaga atau forum kebijakan, tetapi juga menyangkut substansi peran dan daya pengaruh mereka terhadap arah kebijakan yang dihasilkan. Dalam konteks ini, teori representasi dari Hanna Pitkin (1967) menjadi dasar untuk memahami dua dimensi representasi:

Representasi Deskriptif, yaitu kehadiran perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan seperti musyawarah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau tim perencanaan desa;

Representasi Substantif, yaitu sejauh mana perempuan membawa perspektif, kebutuhan, dan kepentingan kelompoknya ke dalam kebijakan yang dihasilkan.

Dalam masyarakat pedesaan seperti Kecamatan Gununghalu, keterlibatan perempuan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya patriarkal, yang sering membatasi ruang partisipasi mereka di luar ranah domestik. Maka dari itu, struktur budaya dan norma gender lokal menjadi faktor penting yang memediasi sejauh mana perempuan dapat menjalankan fungsi representatif secara substantif. Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan feminisme liberal, yang menekankan pentingnya membuka akses dan memberikan peluang yang setara bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik dan kebijakan. Namun demikian, partisipasi yang bermakna hanya dapat terjadi apabila perempuan dibekali dengan kapasitas kepemimpinan, dukungan kelembagaan, dan akses informasi yang memadai.

Di sisi lain, teori interseksionalitas (Crenshaw, 1989) digunakan untuk melihat bahwa pengalaman perempuan tidak homogen. Faktor kelas sosial, tingkat pendidikan, status ekonomi, dan posisi dalam masyarakat turut memengaruhi kemungkinan dan bentuk keterlibatan mereka dalam kebijakan sosial. Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini melihat bahwa keterlibatan perempuan dalam kebijakan sosial di desa dipengaruhi oleh tiga komponen utama:

- Representasi (deskriptif dan substantif)
- Struktur dan nilai budaya patriarkal
- Faktor pendukung seperti afirmasi kebijakan, pendidikan politik, dan akses partisipasi

Ketiga komponen ini akan menentukan arah dan kualitas kebijakan sosial yang dihasilkan, apakah benar-benar responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan, atau masih bersifat elitis dan simbolik.

PROPOSISI PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada proposisi bahwa kehadiran perempuan dalam struktur pengambilan keputusan di tingkat desa belum menjamin terwujudnya kebijakan sosial yang responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan perempuan. Meskipun kebijakan afirmatif dan peningkatan partisipasi perempuan mulai diterapkan di berbagai desa, termasuk Kecamatan Gununghalu, kehadiran perempuan masih banyak yang bersifat simbolik (representasi deskriptif) dan belum bertransformasi menjadi pengaruh substantif terhadap isi kebijakan.

Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor penghambat seperti:

- Kuatnya budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada peran domestik,
- Minimnya pendidikan dan literasi politik di kalangan perempuan desa, Kurangnya dukungan kelembagaan dan struktur desa yang inklusif gender,
- Ketimpangan akses terhadap sumber daya politik dan informasi.

Dengan kata lain, tingginya representasi perempuan secara kuantitatif tidak serta-merta menghasilkan kebijakan sosial yang berperspektif gender, selama tidak dibarengi dengan perubahan struktur dan nilai sosial yang mendalam.

Proposisi Utama Penelitian:

“Meskipun keterlibatan perempuan dalam struktur kebijakan sosial di tingkat desa mengalami peningkatan secara kuantitatif, tanpa dukungan kelembagaan, pendidikan politik, dan transformasi budaya lokal, partisipasi tersebut cenderung bersifat simbolik dan belum mampu mendorong lahirnya kebijakan sosial yang benar-benar responsif gender dan inklusif.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman dan dinamika keterlibatan perempuan dalam proses pembentukan kebijakan sosial di tingkat desa. Pendekatan ini dianggap paling relevan karena mampu mengeksplorasi makna, persepsi, dan nilai yang dihayati oleh para perempuan dalam konteks sosial dan budaya setempat, khususnya di Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat.

Penelitian ini tidak berfokus pada generalisasi statistik, tetapi lebih pada pemahaman kontekstual dan naratif mengenai bagaimana perempuan terlibat, menghadapi hambatan, serta memaknai peran mereka dalam proses pengambilan keputusan kebijakan sosial di lingkup desa.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat, yang dipilih secara purposif karena merepresentasikan wilayah pedesaan dengan struktur sosial patriarkal namun menunjukkan dinamika partisipasi perempuan yang mulai aktif dalam forum-forum sosial dan pemerintahan desa.

Waktu pelaksanaan penelitian adalah pada bulan April hingga Mei 2025, dengan menyesuaikan jadwal kegiatan desa dan ketersediaan informan.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive dengan kriteria bahwa mereka adalah perempuan yang memiliki pengalaman, pengetahuan, atau keterlibatan dalam proses kebijakan sosial di desa. Adapun jenis informan utama meliputi:

Ibu-ibu PKK yang terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial di tingkat RT/RW maupun desa.

Perempuan petugas kecamatan, khususnya yang bekerja di bidang pemberdayaan masyarakat, sosial, atau perlindungan perempuan dan anak.

Perwakilan organisasi lokal atau LSM yang fokus pada isu perempuan, kesehatan, pendidikan, atau pengentasan kemiskinan.

Perempuan tokoh masyarakat, baik formal maupun informal, yang sering diundang dalam musyawarah desa atau kegiatan penyusunan program sosial.

Jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan prinsip ketercukupan informasi (saturation), di mana proses wawancara akan dihentikan ketika informasi yang diperoleh sudah berulang dan tidak menambah data baru yang signifikan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara Semi-Terstruktur Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara terbuka. Format semi-terstruktur memungkinkan eksplorasi terhadap pengalaman dan pendapat informan secara lebih fleksibel, namun tetap terarah sesuai topik penelitian. Durasi wawancara berkisar antara 45–90 menit per informan.

Observasi Non-Partisipatif Peneliti melakukan observasi terhadap forum musyawarah desa, kegiatan PKK, rapat RT/RW, atau program sosial yang diikuti perempuan, untuk mengamati secara langsung interaksi, peran, dan keterlibatan mereka dalam ruang publik dan kebijakan.

Dokumentasi Dokumentasi dilakukan terhadap berbagai data dan dokumen seperti:

Notulensi musyawarah desa

Struktur organisasi desa atau PKK

Foto kegiatan sosial

Profil program pemberdayaan perempuan

Data partisipasi perempuan dalam perencanaan desa atau forum publik lainnya

E. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik (thematic analysis), melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Transkripsi Wawancara Semua hasil wawancara ditranskripsikan secara verbatim dari rekaman suara.

Koding Data Awal Potongan data penting dikode berdasarkan tema seperti: persepsi perempuan, hambatan partisipasi, dukungan struktural, bentuk keterlibatan, dan pengaruh terhadap kebijakan sosial.

Penyusunan Tema Utama Kode-kode dikembangkan menjadi tema besar yang mencerminkan dimensi penting dalam penelitian, misalnya: representasi substantif, peran organisasi perempuan, hambatan budaya lokal, dan dampak partisipasi terhadap isi kebijakan.

Interpretasi dan Kontekstualisasi Tema yang diperoleh dianalisis dengan mengaitkan pada teori yang relevan (feminisme, representasi politik, interseksionalitas) dan konteks sosialbudaya Gununghalu.

F. Uji Validitas Data

Untuk memastikan validitas dan kredibilitas data, digunakan teknik berikut:

Triangulasi sumber: membandingkan data dari berbagai jenis informan (PKK, organisasi perempuan, aparat desa, petugas kecamatan).

Triangulasi metode: menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Member checking: melakukan klarifikasi dan konfirmasi ulang kepada informan jika terdapat data yang kurang jelas atau perlu diperdalam.

Review oleh ahli: pedoman wawancara dan desain analisis dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan ahli gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Wilayah dan Informan

Kecamatan Gununghalu adalah wilayah pedesaan yang berada di Kabupaten Bandung Barat dengan struktur sosial yang masih kental dengan norma tradisional dan peran gender yang dikonstruksi secara konservatif. Namun, terdapat geliat partisipasi perempuan melalui jalur non-formal seperti PKK, Posyandu, dan komunitas lokal.

Penelitian ini melibatkan informan dari berbagai lapisan, yakni:

Ibu-ibu PKK yang aktif dalam kegiatan sosial-kemasyarakatan.

Petugas perempuan kecamatan, khususnya dari bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan sosial.

Perwakilan dari organisasi masyarakat/LSM perempuan.

Tokoh perempuan di tingkat RT/RW yang punya pengaruh informal.

2. Bentuk dan Ruang Partisipasi Perempuan

Temuan menunjukkan bahwa perempuan di Gununghalu mulai diikutsertakan dalam forum-forum resmi, seperti Musrenbangdes, namun masih dalam kapasitas penyampai aspirasi, bukan sebagai pengambil keputusan utama. Kegiatan seperti PKK, pengelolaan Posyandu, dan pelatihan keterampilan adalah ranah umum partisipasi mereka.

Partisipasi ini, menurut teori representasi deskriptif (Pitkin, 1967), bisa dikatakan hadir secara kuantitatif. Namun secara substantif, perempuan masih belum mampu mempengaruhi arah kebijakan secara signifikan.

"Kami diminta datang ke forum, tapi keputusan akhir tetap diambil oleh aparat laki-laki atau tim teknis desa." – (Informan 3, Ketua PKK)

3. Hambatan Struktural dan Kultural

Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi substantif perempuan dihambat oleh beberapa faktor: Dominasi norma patriarki, di mana perempuan dianggap tidak pantas memimpin forum kebijakan. Minimnya kapasitas teknis dan kepercayaan diri perempuan, karena kurangnya pelatihan dan pendidikan politik.

Perangkat kelembagaan desa yang belum sepenuhnya inklusif gender.

Beban ganda yang dialami perempuan (peran publik dan domestik).

“Kami tahu ada kuota, tapi tidak tahu prosedur untuk bisa masuk ke dalam struktur. Banyak yang merasa tidak mampu karena tidak pernah diberi pelatihan.” – (Informan 5, Petugas Kecamatan)

4. Peran Lembaga dan Komunitas Perempuan

“Kadang kalau tidak kita yang usulkan terus-menerus, ya nggak akan masuk program. Tapi kita butuh dukungan juga, bukan cuma diundang pas sosialisasi.” (Informan 3, LSM lokal)

Meskipun hambatan tersebut nyata, perempuan di Gununghalu memperlihatkan inisiatif lokal yang kuat. Organisasi seperti PKK dan LSM perempuan telah menjadi ruang aman dan strategis bagi perempuan untuk:

Mengembangkan solidaritas sosial antarperempuan.

Membangun literasi isu sosial, seperti gizi keluarga, pendidikan anak, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menjadi jembatan informal ke pemerintah desa untuk menyuarakan kebutuhan komunitas.

Menurut pendekatan *policy feminism* (Mazur, 2002), bentuk pengaruh informal melalui organisasi perempuan juga merupakan strategi kebijakan yang efektif—meskipun tidak melalui jalur formal institusi politik.

5. Konteks Interseksional dan Ketimpangan Akses

“Kalau kita bicara soal anak, kesehatan, atau keluarga, baru dianggap penting. Tapi kalau soal anggaran, jarang sekali perempuan dilibatkan serius.” (Informan 4, Anggota Organisasi Perempuan)

Keterlibatan perempuan juga dibentuk oleh identitas sosial lainnya, seperti kelas ekonomi, usia, dan latar pendidikan. Misalnya:

Ibu rumah tangga dari keluarga buruh atau petani lebih sulit mengakses ruang forum, dibanding perempuan yang pernah bekerja sebagai guru atau staf desa.

Perempuan muda lebih kritis dan terbuka, namun belum punya posisi sosial yang cukup kuat.

Perempuan dengan akses ke informasi digital atau jaringan luar desa lebih progresif dan percaya diri dalam menyampaikan pendapat.

Ini sesuai dengan pendekatan *interseksionalitas* (Crenshaw, 1989) yang menekankan bahwa perempuan adalah kelompok yang beragam, dan pengalaman partisipasi mereka dipengaruhi oleh banyak faktor sosial lainnya.

6. Dampak Keterlibatan terhadap Kebijakan Sosial

Meskipun keterlibatan perempuan belum sepenuhnya setara, hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran mereka telah berdampak pada beberapa aspek kebijakan sosial desa, di antaranya:

Penambahan program pemberdayaan ekonomi rumah tangga, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan alat produksi UMKM.

Penguatan layanan kesehatan berbasis komunitas, seperti Posyandu dan edukasi gizi.

Peningkatan perhatian terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga melalui jejaring organisasi perempuan.

Namun demikian, kebijakan-kebijakan tersebut masih bersifat insidental dan tidak selalu termuat dalam dokumen resmi seperti RPJMDes atau Peraturan Desa (Perdes).

7. Sintesis Temuan dan Pembahasan

Temuan penelitian ini menguatkan kesimpulan bahwa di wilayah seperti Gununghalu:

Representasi deskriptif perempuan mulai terbentuk, namun belum diikuti oleh representasi substantif.

Keterlibatan perempuan bersifat separuh formal, lebih banyak pada wilayah eksekusi program, bukan perumusan kebijakan.

Dukungan struktural dan kapasitas personal menjadi kunci menuju partisipasi yang bermakna.

Diperlukan transformasi kelembagaan dan sosial agar keterlibatan perempuan tidak lagi dianggap sekadar “pelengkap”, tetapi menjadi aktor penting dalam arah kebijakan sosial desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pembentukan kebijakan sosial di Kecamatan Gununghalu masih berada dalam tahap perkembangan awal dan menghadapi tantangan struktural serta kultural yang kompleks. Meskipun perempuan telah mulai dilibatkan dalam berbagai forum desa seperti Musrenbangdes dan kegiatan PKK, partisipasi mereka masih bersifat deskriptif dan simbolik, belum sepenuhnya substantif atau berpengaruh langsung terhadap arah dan isi kebijakan sosial.

Terdapat beberapa hambatan utama yang diidentifikasi, yaitu:

Budaya patriarki yang masih dominan, meminggirkan peran perempuan dari ruang pengambilan keputusan formal.

Minimnya literasi politik dan kapasitas kepemimpinan perempuan, khususnya di tingkat desa.

Ketimpangan akses terhadap informasi, waktu, dan pelatihan, yang membuat partisipasi perempuan terbatas pada pelaksanaan program, bukan perumusannya.

Peran organisasi perempuan seperti PKK dan LSM lebih menonjol sebagai saluran informal, belum terintegrasi dalam sistem pengambilan keputusan desa secara struktural.

Namun demikian, terdapat potensi kuat dalam pemberdayaan perempuan akar rumput, yang jika dikembangkan melalui strategi yang tepat, mampu mendorong lahirnya kebijakan sosial yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan komunitas.

B. Saran

Berdasarkan temuan tersebut, penulis merekomendasikan beberapa langkah strategis:

1. Bagi Pemerintah Desa dan Kecamatan:

Mengintegrasikan perempuan secara aktif dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan desa, termasuk dalam struktur tim penyusun RPJMDes dan RKPDes.

Menyesuaikan waktu dan format forum musyawarah agar ramah terhadap peran dan beban kerja perempuan, seperti musyawarah siang hari atau disediakan ruang penitipan anak.

2. Bagi Organisasi Perempuan dan PKK:

Meningkatkan kapasitas anggota melalui pelatihan literasi politik, manajemen program desa, dan advokasi kebijakan sosial berbasis gender.

Menginisiasi forum dialog perempuan-desa yang berfungsi sebagai ruang konsultasi kebijakan dan pemantauan partisipasi perempuan secara berkelanjutan.

3. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Terkait:

Menyediakan program afirmatif dan insentif struktural bagi desa yang berhasil melibatkan perempuan secara substantif dalam kebijakan sosial.

Memperluas sosialisasi kebijakan afirmatif dan hak-hak perempuan melalui dinas pemberdayaan perempuan dan organisasi masyarakat sipil.

4. Bagi Peneliti dan Akademisi:

Melakukan studi lanjutan dengan pendekatan longitudinal atau partisipatif untuk memantau efektivitas program peningkatan partisipasi perempuan di tingkat desa.

Mendorong penelitian yang lebih berfokus pada pengalaman perempuan marginal (buruh tani, perempuan lansia, penyintas kekerasan) dalam proses kebijakan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ihwanul Muttaqin, A. H., & Idris, H. (2023). Partisipasi perempuan kepala keluarga dalam menciptakan inklusi sosial di Desa Pandansari Lumajang. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 165–186. <https://doi.org/10.54471/khidmatuna.v3i2.2952>
- Bagas Pratama, F. D., & Fitriyah. (2022). Efektivitas representasi perempuan pada kelembagaan desa dalam kebijakan pembangunan perempuan dan anak (studi kasus Desa Rancamaya, Cilongok dan Desa Jumbo Kulon, Sokaraja, Banyumas). *Journal of Politic and Government Studies*, –, –. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/31371>
- Karismah, A. N., Miftahul Huda, M., & Kasiami, S. (2023). Gender analysis policy kepemimpinan perempuan di Kabupaten Bojonegoro: Studi kasus Desa Kauman dan Ngringinrejo. *Karismah: Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, –, –. <https://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/19288>
- Syafrudin, I., Casmana, A. R., & Sae, M. F. (2022). Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan Desa Cisaat. *Satwika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 87–95. <https://doi.org/10.21009/satwika.020203>
- Setyowati, Y., Giawa, A., & Marina, R. (2022). Model optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan desa. *Indonesian Governance Journal*, 5(1), –, –. <https://doi.org/10.24905/igj.v5i1.61>

- Pradesa, I. A. (2024). Analisis peran perempuan dalam representasi politik Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(4), 71–83. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v3i4.2601>
- Takayasa, T. I. (2023). The implementation of gender mainstreaming policy in Indonesian local government – The case of Salatiga City 2017–2022. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 5(2), 163–189. <https://doi.org/10.21580/jpw.v5i2.21121>
- Syukri, M. (2023). Gender policies of the new developmental state: The case of Indonesian new participatory village governance. *SAGE Journals*, –, –. <https://doi.org/10.1177/18681034221149750>
- Arief, A. R., Mustari, N., & Khaerah, N. (2022). Women’s involvement in local politics? Realizing reinforcement of gender equality in Sinjai Regency, Indonesia. *Journal of Contemporary Local Politics*, –, –. <https://www.journal.ppishk.org/index.php/jclp/article/view/78>
- Ardhanariswari, R., Haryanto, T., KW, M., & Kunarti, S. (2021). Local government efforts in realizing gender responsive regional policies in Banyumas District. *Jambe Law Journal*, 4(1), 1–19. <https://doi.org/10.22437/jlj.4.1.1-19>
- Prastiwi, J. H., & Yunas, N. S. (2023). Politik desa dan kepemimpinan perempuan: Pengintegrasian isu gender di desa wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, –, –. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/14334>
- Muthmaina, J. S. (2024). The femininomenon of inequality: A data-driven analysis and cluster profiling in Indonesia. *arXiv*, –, –. <https://arxiv.org/abs/2412.00012>
- Pal, A., & De’, R. (2021). For better or for worse? A framework for critical analysis of ICT4D for women. *arXiv*, –, –. <https://arxiv.org/abs/2108.09947>
- Lodi, C., Sacchi, A., & Vidoli, F. (2024). Gender politics, environmental behaviours, and local territories: Evidence from Italian municipalities. *arXiv*, –, –. <https://arxiv.org/abs/2410.06091>
- Das, U., & Tampubolon, G. (2022). Female agency and its implications on mental and physical health: Evidence from the city of Dhaka. *arXiv*, –, –. <https://arxiv.org/abs/2204.00582>